

Orientasi Politik Pemilih Perempuan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Ikatrina Rosyidah^{1*}, Sri Budi Eko Wardani²

^{1,2} Universitas Indonesia, Indonesia

Email: airin.madiun@gmail.com, sbe.wardani68@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh apa pengaruh status sosial ekonomi dan partisipasi politik dengan orientasi politik pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu dengan salah satu ciri yang biasa ditemukan dalam penelitian kuantitatif dengan adanya kausalitas, dimana berusaha menjelaskan pertanyaan “mengapa” untuk memeriksa sebab dari suatu kejadian empiris atau fenomena. Hasil, bahwa pekerjaan, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, dan partisipasi dalam pemilu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap orientasi politik pemilih perempuan, sementara pendapatan, pendidikan, dan keterlibatan dalam partai politik tidak. Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi partisipasi pemilih di setiap daerah, meskipun penelitian juga menyoroti keterbatasan, seperti karakteristik geografis kepulauan dan faktor cuaca yang memengaruhi pengumpulan data

Kata Kunci: Politik, Perempuan, Pemilu

Abstract

The purpose of this study is to explain the extent of the influence of socioeconomic status and political participation on the political orientation of women voters in the 2019 General Election in the Thousand Islands Regency, DKI Jakarta Province. The method used in this study is a quantitative approach, namely with one of the characteristics commonly found in quantitative research with causality, which tries to explain the question "why" to examine the cause of an empirical event or phenomenon. The results showed that employment, involvement in community organizations, and participation in elections partially had a significant effect on the political orientation of women voters, while income, education, and involvement in political parties did not. These findings highlight the importance of considering the various aspects that affect voter participation in each region, although the study also highlights limitations, such as the geographical characteristics of the archipelago and weather factors that affect data collection

Keywords: Politics, Women, Elections

Pendahuluan

Masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam suatu pemilihan dengan datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan memberikan suaranya berarti mengambil bagian atau peranan dalam sebuah kegiatan politik yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi politik (Pratiwi, 2018);(Kumalasari, 2021);(Gunanto, 2020). Logika

How to cite:	Ikatrina Rosyidah, Sri Budi Eko Wardani (2024) Orientasi Politik Pemilih Perempuan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, (5) 7
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

yang dibangun adalah jika semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi masyarakat suatu negara maka akan semakin demokratis pula negara tersebut (Fatayati, 2017);(Ghafur, 2023). Partisipasi politik juga bisa dipengauhi oleh banyak aspek, dimana aspek-aspek yang mempengaruhi tersebut dilatar belakangi oleh orientasi politik sehingga pada akhirnya pemilih memiliki keputusan untuk memilih (Fartini, 2022);(Zamroni, 2016). Orientasi politik atau cara pandang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersumber baik dari dalam ataupun luar masyarakat itu sendiri (Fitriana, 2018);(Triharyanti, Hergianasari, & Nau, 2023).

Orientasi politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat sehingga dapat membentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka untuk memandang suatu objek politik (Dewansyah, 2015);(Ramadhany & Rahmawati, 2020). Dalam hal orientasi politik ini Almond dan Verba mengklasifikasikannya ke dalam 3 jenis orientasi, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif (Mufidah, 2017);(Priandi & Roisah, 2019). Ketiga orientasi tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih berdasarkan orientasi yang dimilikinya.

Jumlah pemilih perempuan jika dibandingkan dengan pemilih laki-laki juga tidak jauh berbeda, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tercatat jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam negeri 190.770.329 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 95.368.749. Sementara jumlah pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki yaitu sebanyak 95.401.580. Melihat jumlah pemilih perempuan yang dapat di sejajarkan dengan pemilih laki-laki, maka dapat dikatakan demokrasi tanpa peran serta perempuan akan menjadi demokrasi yang tidak seimbang.

Demokrasi yang baik turut memperhatikan peran serta dan suara perempuan yang setara dengan laki-laki karena perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara (Tjenreng, 2020). Namun pada kenyataan perempuan masih dianggap sebagai kelas marginal dimana kedudukannya masih sering diremehkan dan kurang diperhatikan oleh masyarakat sosial pada umumnya (Hevriansyah, 2021). Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Diahadi Setyonaluri (2020) masih terdapat bias gender di ruang publik sehingga banyak perempuan yang lebih memilih sektor informal untuk sumber pendapatannya, selain itu norma gender tradisional berakibat pada pembagian peran dalam rumah tangga yang dominan menjadi tugas perempuan saja.

Kesan emansipasi perempuan juga hanya menjadi formalitas semata yang mengharuskan perempuan menerima paradigma sosial tersebut (Haq, 2020). Perempuan dianggap lemah karena sektor domestik yang lebih mendominasi dan umum di masyarakat sehingga jika perempuan berperan aktif dalam dunia politik maka perempuan tersebut dianggap tidak mampu dan lalai akan tugas utamanya dalam rumah tangga. Harus diakui bahwa peran perempuan dalam dunia politik memang kurang diperhatikan karena dunia politik sudah dianggap menjadi wilayah bagi kaum pria dan bahkan sering kali

kandidat perempuan di eksploitasi dengan tujuan memanfaatkan untuk menarik suara sesama perempuan.

Kedua, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan sebuah negara sangatlah penting untuk menjaga kehidupan masyarakat (Alamsyah & Misnan, 2021). Perempuan sering kali mengikutsertakan kebutuhan keluarga sebagai pertimbangan, sehingga cakupan perspektifnya jauh lebih luas jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dengan beragam pengalaman, kebutuhan dan perspektifnya tersebut membantu memastikan tercapainya masyarakat yang lebih representatif, dimana kebutuhan perempuan juga dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Ketiga, melibatkan perempuan masuk akal secara ekonomi. Institusi besar seperti Forum Ekonomi Dunia, Komisi Sosial Ekonomi Asia dan Pasifik, dan Mc.Kinsey & Company, sebuah firma konsultan manajemen global yang terdepan, semuanya menyimpulkan bahwa kesetaraan gender menghasilkan masyarakat yang lebih makmur di mana roda bisnis berjalan lebih baik (Kodiyat & Andryan, 2021).

Partisipasi pemilih di Indonesia menunjukkan angka yang cukup baik, melebihi 80%, menandakan keterlibatan masyarakat yang positif dalam proses demokratisasi (BPS Indonesia, 2019). Namun, pertanyaannya adalah apakah partisipasi ini mencerminkan pemilih yang mandiri dan sadar politik, khususnya bagi pemilih perempuan yang sering dianggap sebagai kelompok minoritas dalam politik (Kodi, 2021). Kabupaten Kepulauan Seribu, bagian dari Provinsi DKI Jakarta, menonjol dengan partisipasi tinggi dalam Pemilu 2019, terutama dari pemilih perempuan, yang merupakan kelompok yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Wilayah ini didominasi oleh nelayan, mencerminkan karakteristik geografisnya yang dikelilingi oleh Laut Jawa. Pemilih perempuan di sini mencapai sekitar 20% dari penduduk setempat, menunjukkan potensi yang signifikan dalam proses demokrasi lokal (BPS Kab. Kepulauan Seribu, 2022).

Dapat diketahui dengan jelas pada tahun 2018-2019 Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi urutan terendah untuk tingkat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota se-DKI Jakarta bila dibandingkan dengan kota-kota DKI Jakarta lainnya. Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Seribu hanya mencapai 1,87% tingkat laju pertumbuhan ekonominya, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga ke tingkat minus sehingga jauh dibawah rata-rata kota-kota lainnya di DKI Jakarta di tahun yang sama berada di atas 3%. Pada tahun 2020 tingkat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Seribu turun drastis menjadi -4,86%, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi sehingga penuruna laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya dialami oleh Kabupaten Kepulauan Seribu saja tetapi juga dirasakan imbasnya di kota-kota DKI Jakarta lainnya.

Jika dilihat hubungan antara partisipasi pemilih perempuan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai lebih dari 80% dan tertinggi se-DKI Jakarta, hal tersebut bertentangan dengan pendapat Seymour M. Lipset yang menyimpulkan dalam bukunya, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap demokrasi suatu negara (tercermin pada tingkat partisipasi pemilih), dimana salah satu aspeknya adalah tingkat

pendidikan. Hasil yang di dapat Lipset menunjukkan tingkat kemakmuran dan tingkat pendidikan yang tinggi berbanding lurus dan terdapat pada negara demokrasi.

Selain Lipset, Almond dan Verba juga menyatakan hal yang mendukung pendapat Lipset sesuai hasil risetnya yang dilakukan pada lima negara di Amerika, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko. Almond dan Verba menemukan bahwa tingkat pendidikan kaum perempuan yang semakin tinggi akan berdampak positif terhadap tingkat partisipasi politik. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya. (Gabriel A. Almond S. V., 1984, pp. 400-401). Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah tingkat partisipasi pemilih perempuan yang tinggi justru berbanding terbalik dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Dari fakta-fakta empiris yang ada bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan yang cukup tinggi dan bahkan di atas rata-rata menunjukkan minat dan peranan yang aktif dari pemilih perempuan di Kabupaten Kepulauan Seribu, padahal jika di lihat dari tingkat pendidikan dan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tergolong paling rendah bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya se-DKI Jakarta. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk menganalisa penyebab terjadinya fenomena ini serta mengetahui orientasi politik pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh status sosial ekonomi dan partisipasi politik terhadap orientasi politik pemilih perempuan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh apa pengaruh status sosial ekonomi dan partisipasi politik dengan orientasi politik pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu dengan salah satu ciri yang biasa ditemukan dalam penelitian kuantitatif dengan adanya kausalitas, dimana berusaha menjelaskan pertanyaan “mengapa” untuk memeriksa sebab dari suatu kejadian empiris atau fenomena. (TimPuskapolUI, 2014). Penelitian ini menggunakan studi kasus pada pemilih perempuan di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pada studi ini peneliti akan menganalisa kasus dengan membuat *riset design*, membuat hipotesa, mengumpulkan informasi dengan menyebarkan kuisioner kepada para responden kemudian menganalisa data yang sudah dikumpulkan melalui *coding* dan *entry* data pada aplikasi untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Penelitian eksplanatoris (*explanatory reasearch*) merupakan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan faktor sebab akibat dari suatu permasalahan atau fenomena. Peneliti menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih

konsep (variabel) yang akan diteliti. Peneliti membutuhkan operasionalisasi konsep, kerangka konseptual dan teori, sehingga dibutuhkan untuk melakukan uji terhadap suatu teori. Untuk itu biasanya peneliti menggunakan teori-teori tertentu yang dikembangkan sehingga menghasilkan dugaan awal (hipotesis) antara variabel satu dengan variabel lainnya yang umumnya dilakukan pada penelitian awal.

Populasi yang digunakan adalah pemilih perempuan di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2019. Pada populasi tersebut memiliki bagian dari jumlah karakteristik yang disebut dengan sampel, sehingga dengan kata lain sampel juga bisa disebut sebagai himpunan kecil yang dipilih oleh peneliti dari himpunan besar yang digeneralisasikan pada suatu populasi. Maka langkah yang dilakukan oleh peneliti setelah merumuskan populasi adalah menetapkan jumlah sampel yang akan digunakan untuk penelitian.

Adapun sampel yang diambil tersebut harus benar-benar representatif sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan yang benar dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling sesuai rumus Maholtra (2005) yaitu dengan cara mengalikan jumlah variabel atau indikator dengan 5. Maka pada penelitian ini sampel yang digunakan minimal sebanyak $6 \times 5 = 30$ responden. Selain itu ada pendapat dari Cohen (2007) bahwa semakin besar suatu populasi, maka akan semakin baik pula jika sampel yang digunakan semakin besar juga, akan tetapi terdapat jumlah ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh peneliti yaitu minimal sampel sebanyak 30 responden. Hal serupa juga dinyatakan oleh Baley dan Mahmud (2011), bahwa setiap penelitian yang menggunakan analisis data statistik maka ukuran sampelnya paling sedikit adalah 30 orang responden.

Dalam penelitian ini data populasi yang digunakan adalah data jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Kepulauan Seribu yang diambil dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Adapun total jumlah populasi pemilih perempuan tersebut dalam penelitian ini adalah 4.202 orang. Berdasarkan rumus *sampling* di atas maka selanjutnya peneliti menggunakan sampel sebanyak 80 orang responden dan teknik cluster random sampling atau sampel acak berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.

Pada Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang terdiri dari 3 kelurahan (kelurahan Pulau Panggang, kelurahan Pulau Kelapa dan kelurahan Pulau Harapan). Sedangkan pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan juga sama terdiri dari 3 kelurahan antara lain; kelurahan Pulau Untung Jawa, kelurahan Pulau Pari dan kelurahan Pulau Tidung. Penelitian ini menggunakan populasi Pulau Kelapa untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan populasi pada Pulau Tidung untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dikarenakan kedua pulau tersebut memiliki jumlah DPT terbanyak per masing-masing area kecamatan sehingga bisa dianggap mewakili populasi secara keseluruhan.

Penelitian ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan sumber data primer berupa kuisioner kepada responden dan data sekunder yaitu studi pustaka yang bersifat saling melengkapi satu sama lain dalam menganalisa penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data bivariat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan pengaruh antar dua variabel penelitian. Dalam menguji hipotesis-hipotesis yang telah dibuat, maka peneliti melakukan sejumlah pengujian yang dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu, pengujian terhadap kuisioner, uji statistik deskriptif, uji hubungan, uji pengaruh dan sebab-akibat. Adapun keseluruhan pengujian menggunakan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain variabel yang digunakan pada penelitian ini menguji hubungan dua variabel yaitu pemilih perempuan sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu orientasi politik. Adapun indikator yang diteliti dibatasi pada indikator yang telah ditentukan peneliti, yaitu komponen status sosial ekonomi yang terdiri dari indikator jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Untuk komponen partisipasi politik terdiri dari indikator keterlibatan dalam Organisasi Kemasyarakatan, keterlibatan dalam Partai Politik dan partisipasi dalam pemilu.

Selanjutnya penelitian kuantitatif ini pada dasarnya dibuat bukan untuk menghasilkan teori baru, akan tetapi dimaksudkan untuk menguji teori dengan empiris yang terjadi di lapangan. Keterbatasan lainnya terdapat pada lokasi Kabupaten Kepulauan Seribu yang terdiri dari pulau-pulau sehingga persebaran respondennya terdapat antar pulau sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil sampel pada pulau atau kecamatan dengan jumlah DPT dan partisipasi tertinggi pada masing-masing kelurahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Terakhir, cuaca DKI Jakarta dengan curah hujan yang tinggi dan tidak menentu sehingga peneliti menyadari keterbatasan waktu dan keamanan untuk melakukan penyebrangan dari pulau ke pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu. Oleh sebab itu dengan banyaknya keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian ini yang selanjutnya dapat memberikan sumbangsih diskursus ilmu politik yang berkaitan dengan orientasi politik khususnya dalam perspektif perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Orientasi Politik

Variabel Pekerjaan (X1)

Dapat dijelaskan dari total 80 orang responden, terdapat 42 orang pemilih perempuan di Kepulauan Seribu yang paham dan mengerti akan visi misi atau program yang telah disampaikan oleh caleg ataupun paslon peserta Pemilu Tahun 2019. Pemilih perempuan sebanyak 42 tersebut merupakan pemilih perempuan dengan status tidak bekerja, sedang mereka yang bekerja hanya sebanyak 6 orang pemilih saja yang mengaku paham akan visi misi atau program yang telah disampaikan oleh caleg ataupun paslon. dari total 80 orang pemilih perempuan yang menjadi responden pada penelitian ini, terdapat 42 orang pemilih perempuan di Kepulauan Seribu yang merasa bahwa faktor penampilan, karakter dan latar belakang caleg ataupun paslon peserta Pemilu Tahun 2019

bukan merupakan hal yang penting atau utama bagi mereka sebagai pertimbangan ketika memilih atau mencoblos di TPS. Sedangkan yang merasa faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang berpengaruh sebanyak 31 orang, kemudian 7 orang pemilih perempuan lainnya ragu-ragu untuk menjawab.

Pemilih perempuan di Kepulauan Seribu sebanyak 80 orang yang menjadi responden pada penelitian ini, hasilnya 45 orang menjawab bahwa imbalan tersebut tidak berpengaruh bagi mereka. Artinya sebagian besar dari pemilih perempuan di Kepulauan Seribu memilih pilihannya tersebut tanpa terpengaruh oleh imbalan apapun yang di tawarkan kepada mereka. Kemudian sisanya adalah mereka sebanyak 21 orang menyatakan bahwa imbalan-imbalan tersebut mempengaruhi pilihan mereka di bilik suara dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 14 orang.

Tabel 1. Korelasi X1 Terhadap Y

		Korelasi X1	
		Pekerjaan	Orientasi Politik
Pekerjaan	Pearson Correlation	1	.372**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	80	80
Orientasi Politik	Pearson Correlation	.372**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nilai 0.001 sesuai dengan rumus korelasi Pearson bahwa jika nilai Sig. < 0.05 maka hasilnya adalah “berkorelasi” sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pekerjaan (X1) memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel orientasi politik (Y). Adapun derajat hubungan adalah “korelasi lemah” sesuai dengan ketentuan bahwa nilai korelasi Pearsonnya adalah sebesar 0.372 (nilai derajat korelasi lemah adalah 0.21 – 0.40). Bentuk hubungannya yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel X maka akan semakin tinggi pula variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi variabel pekerjaan maka akan semakin tinggi pula variabel orientasi politik.

Tabel 2. ANOVA X1

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.138	1	36.138	12.497	.001 ^b
	Residual	225.550	78	2.892		
	Total	261.688	79			

a. Dependent Variable: Pekerjaan
b. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai Sig. sebesar 0.001 < 0.05 maka menunjukkan bahwa variabel X atau variabel pekerjaan berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel orientasi politik.

Tabel 3. Tabel R Square X1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.372 ^a	.138	.127	1.70049

a. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai pada R tabel di atas sebesar 0.372 menunjukkan besarnya hubungan (nilai korelasi) variabel pekerjaan dengan variabel orientasi politik sebesar 37,2%. Sedangkan nilai pada R square sebesar 0.138 menunjukkan nilai seberapa besar pengaruh variabel pekerjaan terhadap variabel orientasi politik sebesar 13,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya selain variabel pekerjaan.

Variabel Pendapatan (X2)

Jumlah Pendapatan dengan pertanyaan kuesioner akan pemahaman pemilih terhadap visi misi dan program yang diusung oleh peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak 80 orang total responden pemilih perempuan terdiri dari 20 orang dengan kategori jumlah pendapatan rendah (pendapatan dibawah Rp 1.000.000,- per bulan), kemudian 59 orang dengan jumlah pendapatan kategori sedang (pendapatan antara Rp 1.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- per bulan) dan sisanya sebanyak 1 orang dengan jumlah pendapatan di atas Rp 10.000.000,- per bulan.

Dari 80 orang tersebut dapat diklasifikasikan pula menjadi beberapa bagian terdiri dari 48 orang yang merasa paham dan mengerti akan visi misi dan program yang diusung oleh para caleg dan paslon peserta Pemilu tahun 2019. Selain itu, terdapat 21 orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 11 orang sisanya menjawab tidak merasa paham akan visi misi dan program yang ditawarkan oleh peserta Pemilu Tahun 2019 ketika berkampanye. bahwa yang dominan paham atau minimal mengetahui tentang visi misi dan program yang diusung oleh peserta Pemilu Tahun 2019 tersebut merupakan pemilih perempuan yang berpendapatan sedang antara Rp 1.000.000, - s/d Rp 10.000.000, - sebanyak 37 orang.

Hasil, pendapatan Sampingan yang dimiliki pemilih perempuan dengan pertanyaan kuesioner akan pemahaman pemilih terhadap visi misi dan program yang diusung oleh peserta Pemilu Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa 48 responden menjawab “Ya” yang artinya mereka paham dan mengerti akan visi misi dan program yang dikampanyekan oleh para peserta Pemilu Tahun 2019. Sebanyak 21 orang responden menjawab “Ragu-ragu” dan sisanya yang menjawab “Tidak” atau tidak mengerti akan visi misi dan program caleg atau paslon peserta Pemilu Tahun 2019 sebanyak 11 orang, bahwa sebagian besar pemilih perempuan yang menjawab “Ya” tentang pemahaman visi misi dan program yang diusung oleh peserta Pemilu tahun 2019 adalah pemilih perempuan yang sebagian besar adalah pemilih perempuan yang tidak memiliki pendapatan sampingan.

Jumlah Pendapatan dengan pertanyaan kuesioner mengenai memilih berdasarkan faktor penampilan, karakter dan latar belakang peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sebagian besar pemilih perempuan (31 orang) dengan jumlah pendapatan kategori sedang

(pendapatan antara Rp 1.000.000, - s/d Rp 10.000.000, - per bulan) memilih bukan berdasarkan penampilan, karakter maupun latar belakang caleg ataupun paslon tersebut. Kemudian dengan kategori jumlah pendapatan yang sama sejumlah 23 orang responden berpendapat sebaliknya, yaitu mereka memilih caleg atau paslon pilihan mereka dengan prioritas penilaian atas dasar penampilan, karakter dan latar belakang caleg dan paslon tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 26 orang lainnya merupakan responden dengan jumlah pendapatan rendah dan tinggi dengan jawaban beragam baik jawaban “Ya”, “Tidak” dan “Ragu-ragu”.

Pendapatan Sampingan yang dimiliki pemilih perempuan dengan pertanyaan kuesioner mengenai faktor penampilan, karakter dan latar belakang peserta Pemilu Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa 31 responden menjawab “Ya” yang artinya bagi mereka faktor penampilan, karakter dan latar belakang caleg atau paslon berperan penting bagi mereka ketika memutuskan untuk memilih. Sebanyak 7 orang responden menjawab “Ragu-ragu” dan sisanya sebanyak 42 orang yang menjawab “Tidak” yang artinya faktor penampilan, karakter dan latar belakang bukan hal yang dominan ketika mereka memilih caleg atau paslon peserta pada Pemilu Tahun 2019.

Jumlah Pendapatan dengan pertanyaan kuesioner mengenai pengaruh imbalan terhadap Keputusan memilih adalah sebagian besar pemilih perempuan (37 orang) dengan jumlah pendapatan kategori sedang (pendapatan antara Rp 1.000.000, - s/d Rp 10.000.000, - per bulan) menjawab “Ragu-ragu” yang mana artinya mereka belum bisa memutuskan dengan tegas apakah mereka akan memilih sesuai pilihan tanpa pengaruh imbalan tersebut. Kemudian dengan kategori jumlah pendapatan yang sama sejumlah 12 orang responden berpendapat “Tidak” yang artinya bahwa imbalan apapun tidak akan mempengaruhi mereka ketika sudah memutuskan pilihan. Sedangkan sisanya sebanyak 10 orang lainnya merupakan responden dengan jumlah pendapatan sedang dengan jawaban beragam baik jawaban “Ya”, yang artinya sangat jelas bahwa imbalan apapun itu sangat berpengaruh bagi mereka ketika memutuskan untuk memilih.

Pendapatan Sampingan dengan pertanyaan kuesioner mengenai pengaruh imbalan terhadap keputusan memilih adalah sebagian besar pemilih perempuan (45 orang) dari 80 orang total jumlah responden pemilih perempuan menjawab “Tidak” baik mereka yang memiliki pendapatan sampingan maupun yang tidak memiliki pendapatan sampingan. Selanjutnya responden yang menjawab “Ragu-ragu” sebanyak 14 orang yang terdiri dari 8 orang pemilih perempuan yang memiliki pendapatan sampingan dan 6 orang lagi tidak memiliki pendapatan sampingan.

Terakhir sebanyak 21 orang pemilih perempuan yang terdiri dari 10 orang berpendapatan sampingan dan 11 orang tidak memiliki pendapatan sampingan yang menyatakan bahwa imbalan berpengaruh bagi mereka saat memutuskan akan memilih atau mencoblos. Artinya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemilih perempuan di Kepulauan Seribu memilih tanpa pengaruh adanya imbalan atau tidak ada imbalan, baik mereka yang memiliki pendapatan sampingan maupun yang tidak memiliki pendapatan sampingan. Ini membuktikan bahwa pemilih perempuan tersebut sadar betul akan

pentingnya suara mereka sehingga tidak semudah itu perjualbelikan dengan iming-iming imbalan dalam bentuk apapun.

Tabel 4. Korelasi X2 Terhadap Y

		Korelasi X2	
		Pendapatan	Orientasi Politik
Pendapatan	Pearson Correlation	1	.013
	Sig. (2-tailed)		.910
	N	80	80
Orientasi Politik	Pearson Correlation	.013	1
	Sig. (2-tailed)	.910	
	N	80	80

Nilai 0.910 sesuai dengan rumus korelasi Pearson bahwa jika nilai Sig. > 0.05 maka hasilnya adalah “tidak berkorelasi” sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan (X2) tidak memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel orientasi politik (Y). Adapun derajat hubungan adalah “tidak ada korelasi” sesuai dengan ketentuan bahwa nilai korelasi Pearsonnya adalah sebesar 0.013 (nilai derajat tidak ada korelasi adalah 0.00 – 0.20). Bentuk hubungannya yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel X maka akan semakin tinggi pula variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi variabel pendapatan maka akan semakin tinggi pula variabel orientasi politik.

Tabel 5 ANOVA X2

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	1	.005	.013	.910 ^b
	Residual	31.945	78	.410		
	Total	31.950	79			

a. Dependent Variable: Pendapatan
b. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai Sig. sebesar 0.910 > 0.05 maka menunjukkan bahwa variabel X atau variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel orientasi politik.

Tabel 6. Tabel R Square X2

		Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.013 ^a	.000		-.013	.63996

a. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai pada R tabel di atas sebesar 0.013 menunjukkan besarnya hubungan (nilai korelasi) variabel pendapatan dengan variabel orientasi politik sebesar 1,3%. Sedangkan nilai pada R square sebesar 0.000 menunjukkan nilai seberapa besar pengaruh variabel pendapatan terhadap variabel orientasi politik sebesar 0%.

Variabel Pendidikan (X3)

Pendidikan Formal dengan pertanyaan kuesioner mengenai pemahaman pemilih perempuan akan visi misi dan program yang diusung oleh peserta Pemilu Tahun 2019

adalah sebagian besar pemilih perempuan berpendidikan formal terakhir SMA atau setingkat sebanyak 23 orang yang mengakui bahwa mereka paham dan mengerti akan visi misi dan program yang diusung oleh caleg atau paslon peserta Pemilu Tahun 2019. Untuk mereka yang menjawab “Tidak” paling banyak dijawab oleh responden dengan pendidikan terakhir SMA dan setingkatnya. Begitupun dengan jawaban “Ragu-ragu” paling banyak di jawab oleh pemilih yang bergelar pendidikan terakhir SMA dan sederajat. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemilih perempuan di Kepulauan Seribu cukup paham dan mengerti akan visi misi dan program yang diusung oleh peserta Pemilu Tahun 2019. Adapun pemilih tersebut mayoritas merupakan pemilih dengan pendidikan terakhir SMA dan setingkatnya.

Dapat disimpulkan dari hasil uraian tabel silang diatas antara Pendidikan Informal dengan pertanyaan kuesioner mengenai pemahaman visi misi dan program yang diusung oleh peserta Pemilu Tahun 2019, bahwa sebagian besar mengerti dan paham (total 48 orang responden) baik mereka yang pernah merasakan bangku pendidikan informal ataupun tidak. Adapun pemilih tersebut paling banyak merupakan pemilih perempuan yang tidak pernah merasakan pendidikan informal selain pendidikan formal mereka.

Pendidikan Formal dengan pertanyaan kuesioner mengenai pengaruh faktor penampilan, karakter dan latar belakang caleg atau paslon terhadap keputusan memilih adalah lebih dari 50% (42 orang) responden berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi keputusan memilih mereka, pemilih perempuan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda namun hasil kuesioner dan tabel silang membuktikan bahwa pemilih perempuan di Kepulauan Seribu memilih tidak hanya berdasarkan faktor penampilan, karakter dan latar belakang saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Pendidikan Informal dengan pertanyaan pengaruh faktor penampilan, karakter dan latar belakang terhadap keputusan memilih pemilih perempuan di Kepulauan Seribu dapat disimpulkan bahwa sebanyak 42 orang atau lebih dari 50% responden pemilih perempuan di Kepulauan Seribu menyatakan bahwa faktor penampilan, karakter dan latar belakang caleg atau paslon tidak mempengaruhi keputusan mereka ketika memilih di TPS. Adapun 42 orang pemilih perempuan tersebut merupakan pemilih perempuan yang tidak merasakan pendidikan informal.

Pendidikan Formal dengan pertanyaan kuesioner mengenai pengaruh imbalan terhadap pilihan ketika mencoblos di TPS adalah sebagian besar pemilih perempuan di Kepulauan Seribu sebanyak 45 orang pemilih menyatakan bahwa imbalan berupa barang atau uang yang sering dibagikan kepada mereka tidak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih di hari pemilihan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemilih perempuan di Kepulauan Seribu sudah sadar akan penting suara mereka yang berharga sehingga tidak dapat dinilai dengan nilai suatu barang atau nominal uang.

Pendidikan Informal dengan pertanyaan pengaruh imbalan terhadap keputusan memilih pemilih perempuan di Kepulauan Seribu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemilih perempuan disana tidak terpengaruh oleh imbalan dalam bentuk

apapun itu sebanyak 45 orang. Sedangkan yang mempengaruhi keputusan mereka sekitar 21 orang dan yang ragu-ragu menjawab sebanyak 14 orang. Dapat disimpulkan bahwa pemilih perempuan yang tidak dipengaruhi imbalan dalam memutuskan pilihannya ketika memilih di TPS sebagian besar adalah pemilih perempuan yang tidak pernah mendapatkan pendidikan informal. Jika dibanding pemilih perempuan yang pernah mendapatkan pendidikan formal hanya sebanyak 15 orang saja. Artinya secara evaluatif pemilih perempuan di Kepulauan Seribu sebagian besar tidak terpengaruh oleh imbalan dalam bentuk apapun mayoritas adalah pemilih perempuan yang tidak berpendidikan informal.

Tabel 7. Korelasi X3 Terhadap Y

Korelasi X3			
		Pendidikan	Orientasi Politik
Pendidikan	Pearson Correlation	1	-.098
	Sig. (2-tailed)		.389
	N	80	80
Orientasi Politik	Pearson Correlation	-.098	1
	Sig. (2-tailed)	.389	
	N	80	80

Nilai 0.389 sesuai dengan rumus korelasi Pearson bahwa jika nilai Sig. > 0.05 maka hasilnya adalah “tidak berkorelasi” sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendidikan (X3) tidak memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel orientasi politik (Y). Adapun derajat hubungan adalah “tidak ada korelasi” sesuai dengan ketentuan bahwa nilai korelasi Pearsonnya adalah sebesar -0.098 (nilai derajat tidak ada korelasi adalah 0.00 – 0.20). Bentuk hubungannya yang negative menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel X maka akan semakin rendah variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi variabel pendapatan maka akan semakin rendah variabel orientasi politik.

Tabel 8. ANOVA X3

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.441	1	1.441	.750	.389 ^b
Residual	149.946	78	1.922		
Total	151.388	79			

a. Dependent Variable: Pendidikan
b. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai Sig. sebesar 0.389 > 0.05 maka menunjukkan bahwa variabel X atau variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel orientasi politik.

Tabel 9 R Square X3

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.098 ^a	.010	-.003	1.38650	

a. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai pada R tabel di atas sebesar 0.098 menunjukkan besarnya hubungan (nilai korelasi) variabel pendidikan dengan variabel orientasi politik sebesar 9.8%. Sedangkan nilai pada R square sebesar 0.010 menunjukkan nilai seberapa besar pengaruh variabel pendidikan terhadap variabel orientasi politik sebesar 1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya selain variabel pendidikan.

Pengaruh Partisipasi Politik Terhadap Orientasi Politik

Variabel Ketergabungan Dalam Organisasi Kemasyarakatan (X4)

Sebanyak 48 orang responden yang bergabung maupun yang tidak bergabung dengan ormas memiliki kecenderungan “Tidak” memahami visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta pemilu tahun 2019, kemudian disusul dengan “Ragu-ragu” sebanyak 21 responden dan sisanya sebanyak 11 orang menyatakan memahami tentang visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta Pemilu Tahun 2019. sebanyak 48 orang responden yang bergabung maupun yang tidak bergabung dengan ormas memiliki kecenderungan “Tidak” memahami visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta pemilu tahun 2019, kemudian disusul dengan “Ragu-ragu” sebanyak 21 responden dan sisanya sebanyak 11 orang menyatakan memahami tentang visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta pemilu tahun 2019.

Sebanyak 42 responden tidak terpengaruh terhadap faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS. Sebanyak 31 responden menyatakan terpengaruh dari faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS dan sisanya sebanyak 7 responden menyatakan ragu-ragu dalam memilih atau mencoblos di TPS berdasarkan faktor penampilan, karakter, dan latar belakang. Pada akhirnya pemilih perempuan baik yang tergabung dan tidak tergabung dalam Ormas lebih dominan atau cenderung memilih tanpa dipengaruhi oleh faktor penampilan, karakter dan latar belakang caleg atau paslon peserta Pemilu Tahun 2019. bahwa sebanyak 42 orang responden tidak terpengaruh terhadap faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS.

Sebanyak 31 responden menyatakan terpengaruh dari faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS dan sisanya sebanyak 7 responden menyatakan ragu-ragu dalam memilih atau mencoblos di TPS berdasarkan faktor penampilan, karakter, dan latar belakang. Sama seperti tabel sebelumnya dari sisi intensitas kegiatan dalam Ormas pemilih perempuan yang cukup intens atau sering maupun yang jarang berkegiatan di Ormas pada akhirnya tidak terpengaruh oleh faktor, penampilan, karakter dan latar belakang peserta Pemilu 2019 ketika akan memilih di bilik suara.

Pemilih perempuan di Kepulauan Seribu sudah menjadi pemilih yang tidak hanya ikut trend dan lingkungan sekitar saja, terlihat dari hasil tabel silang yang memang dominan oleh responden yang menjawab “Tidak” bila dibandingkan yang menjawab “Ya” walaupun masih ada sebagian yang faktor tersebut menjadi acuan ketika memilih. dapat disimpulkan bahwa sebanyak 49 pemilih perempuan yang bergabung maupun yang tidak bergabung dengan ormas memiliki kecenderungan “Tidak” terpengaruh oleh imbalan pada pemilu tahun 2019, kemudian disusul dengan “Ragu-ragu” sebanyak 23 responden

dan sisanya sebanyak 8 orang menyatakan terpengaruh oleh imbalan yang diberikan pada Pemilu Tahun 2019. dapat disimpulkan bahwa sebanyak 49 pemilih perempuan tidak terpengaruh terhadap faktor imbalan dalam memilih atau mencoblos di TPS. Sebanyak 8 responden menyatakan terpengaruh dari faktor imbalan dalam memilih atau mencoblos di TPS dan sisanya sebanyak 23 responden menyatakan ragu-ragu dalam memilih atau mencoblos di TPS berdasarkan faktor imbalan.

Tabel 10. Korelasi X4 Terhadap Y

		Korelasi X4	
		Keterlibatan dalam Ormas	Orientasi Politik
Keterlibatan dalam Ormas	Pearson Correlation	1	.227*
	Sig. (2-tailed)		.043
	N	80	80
Orientasi Politik	Pearson Correlation	.227*	1
	Sig. (2-tailed)	.043	
	N	80	80

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nilai 0.043 sesuai dengan rumus korelasi Pearson bahwa jika nilai Sig. < 0.05 maka hasilnya adalah “berkorelasi” sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ketergabungan dalam Ormas (X4) memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel orientasi politik (Y). Adapun derajat hubungan adalah “korelasi lemah” sesuai dengan ketentuan bahwa nilai korelasi Pearsonnya adalah sebesar 0.227 (nilai derajat tidak ada korelasi adalah 0.21 – 0.40). Bentuk hubungannya yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel X maka akan semakin tinggi variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi variabel ketergabungan dalam Ormas maka akan semakin tinggi pula variabel orientasi politik.

Tabel 11. ANOVA X4

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91.114	1	91.114	4.243	.043^b
	Residual	1674.836	78	21.472		
	Total	1765.950	79			

a. Dependent Variable: Keterlibatan dalam Ormas
b. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai Sig. sebesar 0.043 < 0.05 maka menunjukkan bahwa variabel X atau variabel ketergantungan dalam Ormas berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel orientasi politik.

Tabel 12. R Square X4

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.227^a	.052		.039	4.63382

a. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai pada R tabel di atas sebesar 0.227 menunjukkan besarnya hubungan (nilai korelasi) variabel ketergabungan dalam Ormas dengan variabel orientasi politik sebesar 22.7%. Sedangkan nilai pada R square sebesar 0.052 menunjukkan nilai seberapa besar pengaruh variabel ketergabungan dalam Ormas terhadap variabel orientasi politik sebesar 5.2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya selain variabel ketergabungan dalam Ormas.

Variabel Ketergabungan Dalam Partai Politik (X5)

Sebanyak 48 orang responden tidak terpapar informasi mengenai visi misi ataupun program terkait yang diusung oleh setiap caleg atau paslon peserta Pemilu Tahun 2019. Hal ini mungkin juga disebabkan karena sebagian besar pemilih perempuan yang ada di Kepulauan Seribu tidak bergabung dalam Partai Politik sehingga informasi politis yang di dapat tidak sebanyak mereka yang tergabung dalam Partai Politik. sebanyak 48 orang responden tidak terpapar informasi mengenai visi misi ataupun program terkait yang diusung oleh setiap caleg atau paslon peserta Pemilu Tahun 2019. Hal ini mungkin juga disebabkan karena sebagian besar pemilih perempuan yang ada di Kepulauan Seribu tidak bergabung dalam Partai Politik sehingga informasi politis yang di dapat tidak sebanyak mereka yang tergabung dalam Partai Politik.

Sebanyak 31 pemilih perempuan terpengaruh terhadap faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam menentukan keputusan ketika memilih atau mencoblos di TPS. Sebanyak 7 responden yang menjawab “Ragu-ragu” dan sisanya sebanyak 42 pemilih perempuan menyatakan tidak dipengaruhi oleh faktor penampilan, karakter dan latar belakang caleg atau paslon ketika memilih di TPS. Sehingga dominan sebagian besar bahwa pemilih perempuan di Kepulauan Seribu tidak terpengaruh oleh faktor penampilan, karakter dan latar belakang ketika harus memilih atau mencoblos caleg atau paslon pilihan mereka. Dari semuanya pemilih perempuan yang memiliki intensitas berkegiatan dalam Partai Politik paling dominan bahwa faktor penampilan, karakter dan latar belakang tersebut tidak mempengaruhi keputusan mereka ketika memilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang tergabung dan cukup aktif dalam Partai Politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penampilan, karakter dan latar belakang caleg atau paslon akan tetapi juga mempertimbangkan faktor lainnya selain faktor tersebut.

Sebagian besar (49 orang) pemilih perempuan di Kepulauan Seribu baik yang tergabung dalam Partai Politik dan tidak tergabung, keduanya tidak terpengaruh oleh bentuk imbalan apapun ketika harus memutuskan pilihannya di bilik suara pada hari pemungutan suara, walaupun ada sebagian kecil yang berpendapat dan bagi mereka imbalan tersebut mempengaruhi keputusan mereka. Dari hasil interview langsung oleh beberapa responden pemilih perempuan, mereka mengerti dan paham maksud dari dibagikannya barang-barang atau amplop yang mereka sebut dengan “serangan fajar” namun pemilih perempuan disana juga sudah cukup mengerti bahwa mereka berhak menerima atau menolak imbalan-imbalan tersebut. Namun ketika mereka datang ke TPS untuk menentukan pilihan suaranya, pemilih perempuan tersebut juga sadar bahwa suara mereka berharga dan mereka bebas menentukan pilihan mereka.

Disimpulkan bahwa imbalan-imbalan tersebut tidak mempengaruhi keputusan pemilih perempuan disana ketika akan memilih di TPS baik mereka yang intens berkegiatan dalam Partai Politik ataupun yang tidak aktif. Sehingga dapat dengan jelas kita ketahui pemilih perempuan di Kepulauan Seribu sudah cukup paham dan mengerti pentingnya suara mereka dan tidak hanya di hargai dalam bentuk barang dan imbalan berupa uang juga. Mereka cukup sadar politik dengan aktif datang ke TPS walaupun sudah menerima ataupun menolak imbalan-imbalan yang disebarakan kepada mereka.

Tabel 13. Korelasi X5 Terhadap Y

Korelasi X5			
		Keterlibatan dalam Parpol	Orientasi Politik
Keterlibatan dalam Parpol	Pearson Correlation	1	.067
	Sig. (2-tailed)		.553
	N	80	80
Orientasi Politik	Pearson Correlation	.067	1
	Sig. (2-tailed)	.553	
	N	80	80

Nilai 0.553 sesuai dengan rumus korelasi Pearson bahwa jika nilai Sig. > 0.05 maka hasilnya adalah “tidak berkorelasi” sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ketergabungan dalam Partai Politik (X5) tidak memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel orientasi politik (Y). Adapun derajat hubungan adalah “tidak ada korelasi” sesuai dengan ketentuan bahwa nilai korelasi Pearsonnya adalah sebesar 0.067 (nilai derajat tidak ada korelasi adalah 0.00 – 0.20). Bentuk hubungannya yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel X maka akan semakin tinggi pula variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi variabel ketergabungan dalam Partai Politik maka akan semakin tinggi pula variabel orientasi politik.

Tabel 14. Tabel ANOVA X5

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.865	1	10.865	.355	.553^b
	Residual	2384.522	78	30.571		
	Total	2395.387	79			

a. Dependent Variable: Keterlibatan dalam Parpol
b. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai Sig. sebesar 0.553 > 0.05 maka menunjukkan bahwa variabel X atau variabel ketergabungan dalam Partai Politik tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel orientasi politik.

Tabel 15. R Square X5

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.067^a	.005	-.008	5.52909	

a. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai pada R tabel di atas sebesar 0.067 menunjukkan besarnya hubungan (nilai korelasi) variabel ketergabungan dalam Partai Politik dengan variabel orientasi politik sebesar 6.7%. Sedangkan nilai pada R square sebesar 0.052 menunjukkan nilai seberapa besar pengaruh variabel ketergabungan dalam Partai Politik terhadap variabel orientasi politik sebesar 0.5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya selain variabel ketergabungan dalam Partai Politik.

Variabel Pekerjaan (X6)

Sebanyak 48 orang responden yang tidak memahami visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta Pemilu tahun 2014 memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2014, kemudian disusul dengan “Ragu-ragu” sebanyak 21 responden dan sisanya sebanyak 11 orang menyatakan memahami tentang visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta pemilu tahun 2014. dapat disimpulkan bahwa sebanyak 48 pemilih perempuan yang tidak memahami visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta Pemilu tahun 2014 memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam Pemilu tahun 2014, kemudian disusul dengan “Ragu-ragu” sebanyak 21 responden dan sisanya sebanyak 11 orang menyatakan memahami tentang visi, misi dan program yang disampaikan oleh para peserta pemilu tahun 2014.

Sebanyak 42 orang responden tidak terpengaruh terhadap faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS. Sebanyak 31 responden menyatakan terpengaruh dari faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS dan sisanya sebanyak 7 responden menyatakan ragu-ragu dalam memilih atau mencoblos di TPS berdasarkan faktor penampilan, karakter, dan latar belakang. dapat disimpulkan bahwa sebanyak 42 responden tidak terpengaruh terhadap faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS. Sebanyak 31 responden menyatakan terpengaruh dari faktor penampilan, karakter dan latar belakang dalam memilih atau mencoblos di TPS dan sisanya sebanyak 7 responden menyatakan ragu-ragu dalam memilih atau mencoblos di TPS berdasarkan faktor penampilan, karakter, dan latar belakang.

Sebanyak 49 responden tidak terpengaruh terhadap faktor imbalan dalam memilih atau mencoblos di TPS. Sebanyak 8 responden menyatakan terpengaruh dari faktor imbalan dalam memilih atau mencoblos di TPS dan sisanya sebanyak 23 responden menyatakan ragu-ragu dalam memilih atau mencoblos di TPS berdasarkan faktor imbalan. Disimpulkan bahwa sebanyak 49 responden yang berpartisipasi sebagai penyelenggara, tidak terpengaruh terhadap faktor imbalan dalam memilih atau mencoblos di TPS. Sebanyak 8 responden menyatakan terpengaruh dari faktor imbalan dalam memilih atau mencoblos di TPS dan sisanya sebanyak 23 responden menyatakan ragu-ragu dalam memilih atau mencoblos di TPS berdasarkan faktor imbalan.

Tabel 16. Korelasi X6 Terhadap Y

Korelasi X6			
		Partisipasi dalam Pemilu	Orientasi Politik
Partisipasi dalam Pemilu	Pearson Correlation	1	.220
	Sig. (2-tailed)		.050
	N	80	80
Orientasi Politik	Pearson Correlation	.220	1
	Sig. (2-tailed)	.050	
	N	80	80

Nilai 0.050 sesuai dengan rumus korelasi Pearson bahwa jika nilai Sig. > 0.05 maka hasilnya adalah “berkorelasi” sehingga dapat dikatakan bahwa variabel partisipasi dalam pemilu (X6) memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel orientasi politik (Y). Adapun derajat hubungan adalah “korelasi lemah” sesuai dengan ketentuan bahwa nilai korelasi Pearsonnya adalah sebesar 0.220 (nilai derajat tidak ada korelasi adalah 0.21 – 0.40). Bentuk hubungannya yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel X maka akan semakin tinggi pula variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi variabel partisipasi dalam pemilu maka akan semakin tinggi pula variabel orientasi politik.

Tabel 17. Tabel ANOVA X6

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.489	1	1.489	3.961	.050 ^b
	Residual	29.311	78	.376		
	Total	30.800	79			

a. Dependent Variable: Partisipasi dalam Pemilu
b. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai Sig. sebesar $0.050 < 0.05$ maka menunjukkan bahwa variabel X atau variabel partisipasi dalam pemilu berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel orientasi politik.

Tabel 18. R Square X6

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.220 ^a	.048		.61302	

a. Predictors: (Constant), Orientasi Politik

Nilai pada R tabel di atas sebesar 0.220 menunjukkan besarnya hubungan (nilai korelasi) variabel partisipasi dalam pemilu dengan variabel orientasi politik sebesar 2.2%. Sedangkan nilai pada R square sebesar 0.048 menunjukkan nilai seberapa besar pengaruh variabel partisipasi dalam pemilu terhadap variabel orientasi politik sebesar 4.8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya selain variabel partisipasi dalam pemilu.

Kesimpulan

Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan jumlah pemilih dengan pemilih laki-laki, meskipun mereka menghadapi hambatan seperti faktor keluarga dan literasi politik rendah. Namun, di

Kabupaten Kepulauan Seribu, partisipasi pemilih perempuan, terutama dalam Pemilu Presiden dan anggota DPR, DPD, dan DPRD, cenderung tinggi, melebihi rata-rata tingkat partisipasi di kota-kota lain di Provinsi DKI Jakarta. Mayoritas responden berasal dari suku Betawi dan usia 31-45 tahun, dengan peningkatan partisipasi yang signifikan dari tahun 2009 hingga 2019.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pekerjaan, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, dan partisipasi dalam pemilu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap orientasi politik pemilih perempuan, sementara pendapatan, pendidikan, dan keterlibatan dalam partai politik tidak. Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi partisipasi pemilih di setiap daerah, meskipun penelitian juga menyoroti keterbatasan, seperti karakteristik geografis kepulauan dan faktor cuaca yang memengaruhi pengumpulan data.

BIBLIOGRAFI

- Alamsyah, Alamsyah, & Misnan, Misnan. (2021). Manajemen Komunikasi Politik Partai Golkar Pada Panggung Agregasi Kebijakan Omnibus Law. *KOMUNIKATA57*, 2(2), 89–100.
- Dewansyah, Bilal. (2015). Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 140–162.
- Fartini, Ade. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1–11.
- Fatayati, Sun. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147–163.
- Fitriana, Mia Kusuma. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.
- Ghafur, Jamaludin. (2023). Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 1–25.
- Gunanto, Djoni. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191.
- Haq, Achmad Faisol. (2020). Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1).
- Hevriansyah, Andie. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85.
- Kodi, Dedimus. (2021). *Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia*.
- Kodiyat, Benito Asdhie, & Andryan, Andryan. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 101–112.
- Kumalasari, Reni. (2021). Relasi Agama Dan Politik Di Aceh Pasca Konflik; Pemerintah Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka. *Jurnal Adabiya*, 23(1), 1–18.
- Mufidah, Alfi Lailatul. (2017). *Strategi Komunikasi Politik Dan Pemenangan Pemilu*

- (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Dra. Dewanti Rumpoko, M. Si dan Ir. H. Punjul Santoso, MM pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu 2017). UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
- Pratiwi, Diah Ayu. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13–28.
- Priandi, Rizki, & Roisah, Kholis. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116.
- Ramadhany, Dessy, & Rahmawati, Dian Eka. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–62.
- Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Triharyanti, Nana, Hergianasari, Putri, & Nau, Novriest Uumbu Walangara. (2023). Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022. *Administratus*, 7(3), 1–19.
- Zamroni, Mohammad. (2016). Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus Partisipasi Selebritis Perempuan Dalam Komunikasi Politik Di Partai-Partai Islam Pada Pemilu 2014 Di Indonesia). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 9(1).

Copyright holder:

Ikatrina Rosyidah, Sri Budi Eko Wardani (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

